

BAB III
DINAMIKA SISTEM POLITIK NEGARA BAGIAN
VICTORIA DAN KERJASAMA *SISTER*
***PROVINCE* D.I. YOGYAKARTA – VICTORIA**
MENCAKUP INISIASI PEMBENTUKAN
KERJASAMA SERTA HAMBATAN YANG
DIHADAPI DALAM PERWUJUDAN
PEMBENTUKAN *SISTER PROVINCE*

A. Dinamika Sistem Politik Negara bagian Victoria

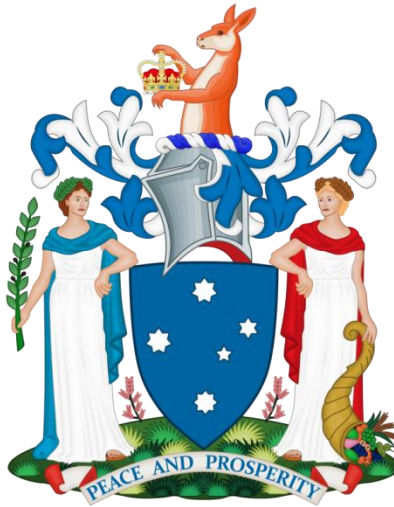
1. Sejarah Victoria

Victoria merupakan sebuah Negara bagian Australia dengan luas terkecil namun merupakan Negara terpadat kedua di Australia setelah New South Wales. Pada awalnya Victoria merupakan sebuah kota yang berada di New South Wales, namun sejak tahun 1851 Victoria resmi memisahkan diri dari Negara bagian New South Wales dan menjadi sebuah koloni yang merdeka.

Hal tersebut dikarenakan adanya perburuan emas secara besar-besaran yang terjadi di dunia sejak ditemukannya tambang-tambang emas di Ballarat dan di Bendigo. Pada tahun 1901 Victoria kembali bergabung menjadi salah satu Negara bagian Australia seperti Negara bagian lainnya.

Sebuah kota di Victoria yaitu Melbourne, dulunya pernah menjadi ibukota Australia selama 26 tahun sejak 1901 – 1927 sebelum akhirnya kini Canberra yang menjadi ibukota Australia setelah selesai dibangun.

Gambar 3.1 Lambang Victoria (*Coat of arms*)



Sumber : dpc.vic.gov.au

2. Geografis Victoria

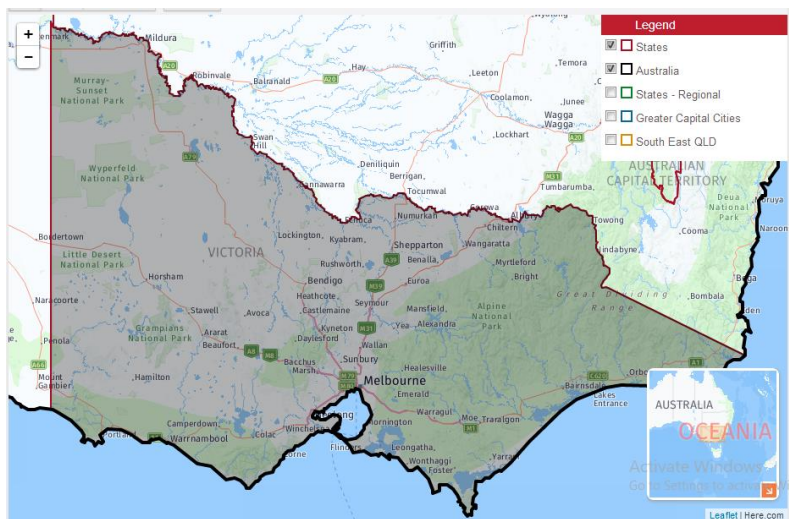
Victoria merupakan sebuah Negara bagian Australia yang terletak di sebelah tenggara benua Australia. Victoria berbatasan dengan South Australia di sebelah barat dan New South Wales disebelah utara yang dibatasi dengan sungai Murray. Di sebelah selatan Victoria terdapat sebuah pelabuhan besar yaitu *Port Phillip* yang terletak di Melbourne.

Victoria merupakan sebuah Negara yang terdiri dari kota-kota besar, pedesaan, serta pemukiman, oleh karena itu Victoria memiliki beberapa tipe topologi yang berbeda-beda. Iklim di Victoria pun berbeda-beda sebanding dengan perbedaan topologi yang dimilikinya. Iklim Victoria berbeda di beberapa tempat, seperti Gippsland yang beriklim basah serta iklim sedang di bagian tenggara dan bersalju di Alpine yang memiliki gunung Bogong sebagai puncak tertinggi.

Selain itu, terdapat juga dataran yang kering dibagian barat serta terdapat sungai di Victoria, salah satunya yaitu sungai Murray yang hampir mengelilingi perbatasan antara Victoria dengan New South Wales. Namun, selain sungai Murray terdapat juga sungai-sungai dan lembah di Victoria yaitu *Murray River*, *King Valley*, *Loddon River*, *Avaca River*, *Darling River*, *Gleneig River*, *Yarra Valley*, *Alpine Valley*.

Selain itu, Victoria memiliki sumber kekayaan bumi yang kaya dengan komoditas termasuk batubara coklat, emas, minyak dan gas, pasir mineral dan logam dasar semuanya berkontribusi terhadap kemakmuran Negara (Earth Sources Victoria, 2015).

Gambar 3.2 Peta Victoria



Sumber : earthresources.vic.gov.au

3. Demografis Victoria

Victoria memiliki luas yang paling kecil diantara Negara bagian lainnya di Australia. Namun, Victoria memiliki jumlah penduduk terpadat kedua setelah New South Wales. Victoria merupakan Negara bagian yang memiliki masyarakat dengan beragam kebudayaannya,

Victoria juga merupakan sebuah Negara yang memiliki tingkat pertumbuhan tercepat di Australia (Victorian Multicultural, 2016).

Pada sensus 2016, populasi Victoria adalah 5,93 juta, dibandingkan dengan 5,35 juta pada sensus 2011 mengalami kenaikan sebesar 10,7 %, serta 8,8 % jika dibandingkan dengan keseluruhan wilayah Australia, lebih dari 75% penduduk Victoria tinggal di Melbourne, yang terletak di selatan negara bagian, area metropolitan Melbourne yang lebih besar adalah rumah bagi sekitar 4,17 juta orang (Regional Population Growth, 2012).

Agama Kristen menjadi agama mayoritas di Victoria termasuk Kristen katolik roma, selain itu terdapat juga beberapa agama yang dipeluk oleh penduduk Victoria yaitu agama Budha, Muslim, serta terdapat juga orang Yahudi. Namun, diantara itu semua agama Hindu merupakan agama yang mengalami pertumbuhan paling cepat. Terdapat juga mereka yang memutuskan untuk tidak memeluk agama manapun.

4. Perekonomian Victoria

Selain dikenal sebagai Negara bagian terpadat kedua di Australia setelah New South Wales. Victoria juga merupakan sebuah Negara bagian yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, serta perekonomian di Negara inipun merupakan perekonomian terbesar kedua di Australia setelah New South Wales.

Secara umum, kondisi perekonomian Victoria yang kurang kondusif, sebagai akibat kebakaran hutan, kekeringan, ketidakpastian ekonomi global dan menurunnya daya serap pasar internasional, mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap anggaran negara bagian tersebut tahun 2003-2004. Namun demikian, anggaran belanja Victoria masih memungkinkan adanya pertumbuhan ekonomi karena kondisi finansial yang relatif stabil. (Kementrian Luar Negeri)

GDP Victoria yaitu mencapai 23% dari GDP Australia, ekonomi Victoria bahkan lebih besar dari gabungan antara ekonomi Singapura dan New Zealand, pendapatan ekonomi Australia memiliki spesialisasi pada sektor bernilai dan berkualitas tinggi seperti pendidikan, makanan, dan pariwisata, sekitar setengah dari pendapatan ekonomi tersebut adalah kegiatan ekonomi yang dihasilkan oleh sektor jasa yang berbasis keahlian seperti pendidikan, keuangan dan asuransi, serta properti dan pariwisata. (BKPM, 2017)

5. Pemerintah Victoria

Victoria memiliki bentuk pemerintahan parlementer berdasarkan sistem *Westminster* yang berkembang di wilayah Britania Raya. Dalam pemerintahan Victoria, kekuasaan legislatif berada di tangan parlemen yang di dalamnya terdiri dari Gubernur yang merupakan wakil dari Ratu, eksekutif yaitu pemerintah itu sendiri, dan legislatif yang terdiri dari dua dewan atau majelis dewan legislatif dan majelis legislatif. Dewan Legislatif kadang-kadang disebut sebagai majelis tinggi dan Majelis Legislatif kadang-kadang disebut majelis rendah (Parliament of Victoria, 2010).

Perdana Menteri saat ini adalah Daniel Andrews MP. *Premier* adalah pemimpin partai atau koalisi yang mendapat dukungan mayoritas anggota di Dewan Legislatif. *Premier* adalah menteri utama pemerintah dan mengepalai Departemen Premier dan Kabinet. (Parliament of Victoria, 2017)

B. Kerjasama *Sister Province* D.I Yogyakarta – Victoria

1. Inisiasi Pembentukan Kerjasama *Sister Province*

D.I. Yogyakarta - Victoria

Inisiasi awal kerjasama D.I. Yogyakarta dengan Victoria muncul pada bulan Juni 2013 saat *premier* Victoria, Mr. Denis Naphine beserta delegasi 450

Pengusaha UKM Victoria berkunjung ke Yogyakarta dalam rangka penajakan peluang bisnis. *Premier* ditemui oleh Gubernur D.I. Yogyakarta, dan salah satu hasil dari pertemuan tersebut adalah wacana pembentukan kerja sama *sister province* antara D.I. Yogyakarta dan Victoria (BKPM, 2017). Setelah adanya wacana pembentukan kerjasama yang ditawarkan Victoria kemudian D.I. Yogyakarta menyambut dengan baik tawaran kerjasama tersebut untuk kemudian dipertimbangkan dan dibicarakan dalam sebuah pertemuan antar menteri.

Tawaran tersebut kemudian dilihat dan ditimbang potensinya, dan dilihat bahwa Victoria berpotensi dan dianggap akan bisa memberikan keuntungan, selain itu karakteristik keduanya juga hampir sama maka sangat mungkin untuk terjalin kerjasama. Selain itu, karena banyaknya tawaran yang masuk untuk mengajak D.I Yogyakarta bekerjasama, maka tawaran-tawaran tersebut dirapatkan dengan instansi terkait, kemudian ditemukan beberapa bidang yang berpotensi dikerjasamakan, lalu kemudian meminta persetujuan dari gubernur. (Albana, 2018)

Rencana tujuan kerjasama keduanya berjalan pada tanggal 30 September 2015 dengan ditanda tangannya *Letter of Intens* (LoI). Kerjasama tersebut meliputi (Jogjainvest, 2017) :

- a. Promosi komunikasi dan persahabatan, termasuk pengetahuan saling kunjung berkala;
- b. Pertukaran informasi, ahli dan pengalaman;
- c. Mendorong kolaborasi seni budaya, pendidikan dan area kerjasama lainnya.

Setelah melalui beberapa kunjungan dan pertimbangan, berlanjutlah hubungan antara kedua kota dengan ditandatangani MoU pada tanggal 3 Mei 2017 oleh pimpinan kedua kota tersebut sebagai tanda dimulainya kerjasama D.I. Yogyakarta dengan Victoria. Berdasarkan pembicaraan dengan pihak Pemerintah Victoria, serta mempertimbangkan masukan dari KJRI

Melbourne, MoU kerja sama persahabatan DIY – Victoria ditandatangani secara terpisah oleh *Premier* Victoria di Melbourne, dan Gubernur DIY di Yogyakarta. Penandatanganan oleh Gubernur DIY dilakukan tanggal 3 Mei 2017 malam di Kraton Yogyakarta, bertepatan dengan kunjungan Gubernur Victoria, Australia Hon. Linda Dessau di Yogyakarta tanggal 3 – 4 Mei 2017. Dalam MoU tersebut dimuat bidang-bidang yang dikerjasamakan, yaitu pertukaran kebudayaan, inovasi industry, serta pertukaran pendidikan.

2. Hambatan yang Dihadapi Dalam Perwujudan Pembentukan *Sister Province* Daerah Istimewa Yogyakarta - Victoria

Dalam pembentukan kerjasama *sister province* antara D.I. Yogyakarta – Victoria tentunya tidak luput dari hambatan-hambatan yang dihadapinya. Hambatan tersebut dapat muncul dari beberapa aspek, dan setiap Negara pasti mempunyai hambatannya sendiri. Dalam kasus perwujudan kerjasama *sister province* antara D.I. Yogyakarta – Victoria ini hambatan yang dihadapi antara lain, yaitu (Albana, 2018) :

- 1) Keterbatasan anggaran di masing-masing Negara
- 2) Keterbatasan jarak dan waktu menyebabkan kesulitan dalam menentukan waktu penandatanganan MoU karena mencari momentum yang tepat sangatlah sulit. Sehingga, terdapat beberapa program kerjasama yang sudah dilaksanakan sebelum MoU karena memang sudah terjalin hubungan masyarakat yang kuat dan bagus antara masyarakat D.I. Yogyakarta dengan Victoria.
- 3) Kurangnya koordinasi antara instansi yang seharusnya melaksanakan program kerjasama sesuai dengan bidangnya. Misalnya, kerjasama dibidang pendidikan, bidang kebudayaan, dan bidang industri kreatif yang mana seharusnya dilaksanakan sesuai dengan dinas/instansi bidangnya masing-masing. Program

kerjasama bidang pendidikan seharusnya turut juga dilaksanakan oleh dinas pendidikan begitupun dengan bidang kebudayaan yang seharusnya dilaksanakan oleh dinas kebudayaan. Namun, kebanyakan dinas pendidikan dan dinas kebudayaan merasa bahwa hal tersebut adalah tugas dan tanggung jawab Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) dan bukan tugas serta tanggung jawab dinas pendidikan dan dinas kebudayaan. Tidak ada sinkronisasi atau bahkan mungkin tidak menyadari bahwa setelah ditandatanganinya MoU maka kemudian program-program kerjasama yang telah tercantum dalam MoU tersebut juga menjadi tugas dan tanggungjawab semua instansi yang berhubungan bukan saja tugas dan tanggung jawab Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM).